

**PENERAPAN *PRUDENTIAL BANKING* SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR  
RISIKO KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
(Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu)**

Warda Rahma Yanti  
Moch. Dzulkirom A.R  
Devi Farah A.  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
[warda\\_rahma@yahoo.com](mailto:warda_rahma@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Kredit Usaha Rakyat (KUR) is the bank provided a credit facility to the customer the lower middle, rather to customers that have a good effort at aspects a farm, trade, and agriculture. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu each performs activities always apply principle of prudential banking, especially on the credit. The application of the principle of prudential performed starting from scratch debtor applying for credits analysis of the provision of the credits to a keel credit. This type of research is a descriptive approach through case studies. The application of the principle of prudential banking applied in the company it can be seen from the various conditions set by Bank Indonesia. The provisions of the prudential principle is a Capital Adequacy Ratio (CAR), a maximum credit granting (Legal Lending Limit), liabilities allowance earning assets, and the provisions of the self regulatory banking. The company is seen that non performing loans it appears that their non-performing loans from year to year increase although has apply the principle of prudential banking, but there of non-performing loans.*

**Key Words :** *prudential banking, non-performing loans.*

**PENDAHULUAN**

Menurut Kasmir (2010:2) Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang ada di Indonesia memiliki peranan penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Peranan perbankan adalah melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*) dan jasa-jasa perbankan bank lainnya (*service*). Peranan bank harus dikelola secara bersamaan, karena peranan yang satu dengan peranan yang lain saling berkaitan sehingga apabila salah satu dari peranan tersebut tidak dilaksanakan maka pihak bank itu sendiri akan mengalami suatu kerugian.

Bank memiliki peranan dalam menghimpun dana bagi masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank sebagai kreditor harus melakukan analisis dan mengevaluasi kredit yang diajukan oleh debitor. Pihak bank memiliki kebijakan dalam menganalisis dan mengevaluasi salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) serta prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economic*).

Menurut Usman (2001:18) Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menyatakan bahwa menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bertujuan agar bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan

dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayai dan dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien.

PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu merupakan salah satu bank daerah Jawa Timur yang menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan usahanya, salah satunya dalam memberikan kredit. Salah satu produk keunggulan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah golongan menengah ke bawah yang memiliki usaha baik di bidang peternakan, perdagangan maupun pertanian. Hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi nasabah untuk memilih jenis kredit ini sebagai penambah modal kerja dan usahanya. Namun tak jarang pula pemberian kredit yang mudah itu mengakibatkan penunggakan dalam pembayaran, bahkan mungkin terjadi risiko kredit bermasalah. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan mulai dari awal debitur mengajukan permohonan kredit, analisis pemberian kredit sampai lunasnya kredit. Analisis kredit dan pengawasan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kredit bermasalah karena adanya suatu ketidakpastian dalam pengembalian pinjaman kredit.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kredit

Menurut Mulyono (2001:9) kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

### Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/PMK.05/2008 Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

## Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*)

Menurut Usman (2001:18) prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

## Kredit Bermasalah

Menurut Mahmoeddin (2002:3) kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya tidak menepati jadwal angsuran, persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan agunan dan sebagainya.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan studi kasus, karena menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam penerapan *prudential banking*. Menurut Indrianto dan Supomo (2002:26) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta, ini dari suatu populasi. Menurut Maxfield dalam Nazir (2005:57) penelitian menggunakan pendekatan studi kasus yaitu penelitian tentang subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

## Fokus Penelitian

Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kebijakan pemberian kredit berdasarkan prinsip *prudential banking*.

b. Kredit bermasalah.

Adapun langkah-langkah dalam analisis ini adalah:

1. Menganalisis kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip *prudential banking*

a) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR).

b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

c) Kewajiban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

d) Ketentuan *self - Regulatory banking*.

1) Pedoman Kebijakan Perkreditan.

2) Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.

3) Penyusunan Rencana Kerja.

4) Teknologi Sistem Informasi.

5) Kegiatan Transaksi Derivatif.

2. Menganalisis Kredit Bermasalah.

Perhitungan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

#### a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan perusahaan untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian perusahaan yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank mengandung risiko kredit. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) menunjukkan CAR yang berfluktuasi, dari tahun 2010 sebesar 19,47%, turun di tahun 2011 menjadi 16,53% dan tahun 2012 sebesar 26,56%, hal ini terlihat bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) mempunyai kinerja yang baik dan termasuk bank yang sehat karena tidak sampai kurang dari standar minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8%.

#### b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum pemberian Kredit merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap petugas bank terutama pada bagian kredit dalam memberikan kredit kepada calon debitur. Masing-masing bank mempunyai kebijakan sendiri dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit, suatu bank pasti memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP), salah satunya pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) memiliki

SOP berupa Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPPK). Dalam BPPK terdapat prosedur pemberian kredit, plafond dan pengawasan kredit. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar Rp. 500.000.000. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam memberikan kredit tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit, selain itu dalam menilai agunan selalu lebih besar daripada besarnya nilai pinjaman yang diajukan oleh debitur.

c) Kewajiban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

PPAP merupakan penyisihan dari aktiva produktif suatu bank baik aktiva produktif yang lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Bank wajib membentuk suatu penyisihan aktiva produktif yang cukup guna menutup risiko kerugian. Salah satu bentuk kebijakan penyisihan aktiva produktif adalah kredit, dalam pemberian kredit wajib di analisis terutama jaminan debitur, prospek usaha dan menganalisis kondisi keuangan serta kemampuan membayar calon debitur. Pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) PPAP yang telah dibentuk pada tahun 2011 sebesar 2.203 kredit lancar, 114 dalam perhatian khusus, 213 kurang lancar, dan 1.630 kredit macet. pada tahun 2012 PPAP yang telah dibentuk sebesar 2.709 kredit lancar, 384 dalam perhatian khusus, 56 kurang lancar, 679 diragukan dan 1.340 kredit macet. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) telah melaksanakan kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif dan telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### d) Ketentuan *Self Regulatory Banking*

Ketentuan *Self Regulatory Banking* merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan pengawasan yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten terhadap ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Ketentuan *Self Regulatory Banking* dibuat dan PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP) berbentuk Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BMPK). Hal ini terlihat bahwa dalam menjalankan fungsinya, PT.

Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) selalu berpedoman pada BPPK dan pada ketentuan bank yang berlaku. Ketentuan *Self Regulatory Banking* terdiri dari :

#### 1) Pedoman Kebijakan Perkreditan

Pedoman kebijakan perkreditan pada bank digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala macam kegiatan dan pengawasan terhadap penyaluran dana kepada calon nasabah. Dalam melaksanakan penyaluran dana pihak bank juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) agar dalam mengelola kegiatan perbankan sesuai dengan ketentuan dan terarah. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu menunjukkan bahwa dalam memberikan kredit sesuai dengan pedoman kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan, pihak bank telah melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, terlihat bahwa dalam memberikan kredit selalu berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (BPPK).

#### 2) Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank

Pengawasan kegiatan usaha dilakukan bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Auditor cabang berada di bawah Divisi Pengawasan, dimana auditor bertugas untuk melaporkan segala macam bentuk tindakan yang dicurigai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan adanya auditor cabang dalam suatu kantor cabang terlihat sangat efektif, maka setiap pegawai akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu di dalam struktur organisasi telah memiliki seorang auditor cabang yang dibawah oleh Divisi pengawas, terlihat bahwa seluruh karyawan pada bank sudah efektif dan berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, serta dalam melakukan setiap kegiatan usaha selalu diawasi oleh seorang auditor cabang.

#### 3) Penyusunan Rencana Kerja

Pencapaian target perusahaan diperlakukan adanya suatu strategi perencanaan kerja yang matang. Misalnya

penyaluran kredit perlu dilakukan strategi dalam memberikan dana pinjaman harus selalu dianalisis dan dilakukan pengawasan agar tidak terjadi risiko kredit bermasalah. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim), dalam menyusun rencana kerja dilakukan beberapa langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran rencana bisnis dalam jangka panjang dan jangka pendek adalah dengan meningkatkan program pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan personalia dan pengelolaannya sehingga lebih profesional serta melakukan kerjasama dengan bank lain di luar provinsi Jawa Timur dalam hal pelayanan.

#### 4) Teknologi Sistem Informasi

Pengembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan yang baik, bank terus berupaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Teknologi informasi merupakan pendukung utama sistem perbankan serta operasional bank, harus terus dikembangkan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan bank dan berkompetisi dengan pasar perbankan nasional dan Internasional. Salah satunya pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu teknologi sistem informasi yang digunakan adalah SID (Sistem Informasi Debitor) melalui *BI checking*. Dalam menjalankan fungsinya dan memperoleh informasi calon debitor pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu menggunakan SID melalui *BI checking*, terlihat bahwa dalam penggunaan sistem informasi sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5) Kegiatan Transaksi Derivatif

Kegiatan transaksi derivatif merupakan suatu transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) dalam transaksi derivatif terkait dengan suku bunga tidak mengalami suatu masalah. Ketentuan maksimal suku bunga pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 20-22%

yang ditetapkan oleh bank pusat, pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu terlihat bunga yang dipakai sebesar 1% per bulan efektif. PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu telah menaati ketentuan dari kantor pusat dengan memberikan kredit tidak melebihi suku bunga yang telah ditetapkan.

## 2. Analisis Kredit Bermasalah

Perhitungan persentase tunggakan kredit dapat ditentukan dengan menggunakan rumus *Non Performing Loan* (NPL). Bank Indonesia menetapkan batas maksimum NPL sebesar 5%. Perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Tabel *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu.

Thn	Realisasi KUR	Kredit Bermasalah	NPL
2010	16.511.000.000	124.536.258,42	0,75%
2011	44.902.000.000	396.123.040,00	0,88%
2012	64.455.000.000	3.112.071.650,16	4,83%

Sumber : Data Diolah

NPL di atas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NPL tahun 2010} &= \frac{124.536.258,42}{16.511.000.000,00} \times 100\% \\ &= 0,75426\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPL tahun 2011} &= \frac{396.123.040,00}{44.902.000.000,00} \times 100\% \\ &= 0,88219\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPL tahun 2012} &= \frac{3.112.071.650,16}{64.455.000.000,00} \times 100\% \\ &= 4,82829\% \end{aligned}$$

Tabel di atas menunjukkan *Non Performing Loan* (NPL) dari tahun 2010 sampai tahun 2012 cenderung meningkat. NPL pada tahun 2010 sebesar 0.75%, meningkat di tahun 2011 sebesar 0.88%, pada tahun 2012 peningkatan NPL meningkat drastis menjadi 4.82%. keadaan tersebut menggambarkan bahwa semakin meningkatnya jumlah realisasi kredit yang diberikan kepada debitor, maka semakin

meningkat pula risiko terjadinya kredit bermasalah, *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan kinerja perusahaan semakin menurun, karena kemungkinan kurang disiplinnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) khususnya pada proses analisis kredit.

Dari data tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit kurang baik. Dengan bank menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) akan sedikit meminimalisir risiko kredit bermasalah, sehingga NPL akan turun.

Tahapan dalam mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank adalah :

- Pihak bank melakukan rekapitulasi data nasabah yang angsuran pinjamannya bermasalah.
- Mengirimkan surat peringatan atau surat pemberitahuan atas tunggakan kredit.
- Melakukan penagihan rutin secara langsung dengan mendatangi rumah debitor.
- Melakukan upaya penyelamatan 3R(*Rescheduling, Restructuring, Resettlement*) dengan menilai pada prospek usaha debitor yang masih dapat diperbaiki.
- Melakukan pelelangan atas agunan debitor dan dilakukan penghapusbukuan (*Write off*).

Beberapa tahapan di atas menunjukkan tindakan yang harus dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu selain itu pihak bank harus mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan dalam penyaluran kredit karena dalam proses analisis kredit harus sering dilakukan sampai kredit tersebut lunas, hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan kredit berjalan lancar sesuai dengan ketentuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

- Asas kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

2. Kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dalam prinsip kehati-hatian terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, ketentuan tersebut adalah kewajiban penyediaan modal minimum (CAR), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), kewajiban penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), dan ketentuan *self regulatory banking*.
3. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 5%, namun dari data analisis menunjukkan *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yakni NPL pada tahun 2010 sebesar 0.75%, di tahun 2011 masih tergolong kecil yaitu 0.88%, namun pada akhir 2012 NPL meningkat drastis menjadi 4.82%. hal ini menunjukkan penurunan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu, dan dari analisis tersebut seharusnya perusahaan mengambil tindakan cepat untuk menanggulangi terjadinya semakin besar kredit bermasalah nantinya.
4. Tindakan yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi kredit bermasalah adalah dengan cara mengirimkan surat peringatan ke rumah debitur serta melakukan penagihan secara rutin dan melakukan upaya penyelamatan 3R (*rescheduling, restructuring, resettlement*) dan langkah terakhir dengan melakukan pelelangan atas agunan debitur untuk melunasi angsuran kredit yang bermasalah.
3. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu dalam pemberian kredit, besarnya jaminan atau agunan yang dimiliki debitur perlu dianalisis dengan teliti, karena jaminan tersebut yang terakhir digunakan oleh bank untuk mencover dan menutup semua angsuran yang tidak terbayar apabila terjadi kredit bermasalah yang mengakibatkan sampai macetnya angsuran debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir.2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Cetakan kesembilan. Jakarta : Rajawali Press.
- Mahmoeddin, Drs.H.As. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta:PT. Sinar Multi press.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perkreditan. Bagi Bank Komersil* Jakarta : BPFE.
- Nazir, Moch. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Peraturan Menkeu Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR.
- Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang *Perbankan*. Penerbit. Jakarta : Asa Mandiri.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

## SARAN

1. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu, seluruh staf perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan penanganan kredit harus lebih intensif memperhatikan penerapan *prudential banking* dalam menjalankan segala kegiatan usaha bank terutama dalam menyalurkan kredit, agar terhindar dari kredit bermasalah.
2. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah, Tbk (Bank Jatim) Cabang Batu diharapkan dalam memantau atau melakukan pengawasan dan menganalisis prospek usaha debitur lebih ditingkatkan, terutama bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah.